

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN LAHAN MARJINAL YANG
BERKELANJUTAN PADA KAWASAN PESISIR DI KABUPATEN BANTUL
PROVINSI D.I. YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh sebutan Sarjana Sains Terapan



Disusun oleh :

IRVAN KURNIAWAN
NIM. 06152239

**PROGRAM DIPLOMA IV PERTANAHAN
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2010

INTISARI

Keberadaan lahan pada kawasan pesisir selatan Kabupaten Bantul cukup luas. Namun sampai dengan saat ini pengelolaannya masih belum optimal. Masih terdapat lahan-lahan yang dibiarkan begitu saja tanpa upaya pengelolaan lahan. Sementara itu, lahan pertanian di Kabupaten Bantul mengalami penyusutan sebesar 20 ha setiap tahunnya. Keterbatasan lahan pertanian yang semakin sempit membutuhkan solusi untuk mempertahankan ketahanan pangan di Kabupaten Bantul, salah satunya dengan memanfaatkan lahan pada kawasan pesisir, sebagai lahan pertanian. Namun dalam pemanfaatan lahan pada kawasan pesisir tentunya terdapat banyak kendala. Berdasar pada kondisi yang diilustrasikan diatas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai jenis-jenis kendala dalam pengelolaan lahan dan upaya petani dalam mengatasi kendala tersebut serta upaya yang dilakukan petani dalam mengelola lahan kawasan pesisir untuk kegiatan pertanian agar berfungsi optimal dan tetap berkelanjutan.

Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Pemilihan responden (sampel) dilakukan dengan cara *purposive sampling* (pemilihan sampel bertujuan). Responden dalam kegiatan penelitian mencakup para petani penggarap lahan pada kawasan pesisir yang meliputi petani yang sudah menggarap lahan dengan baik, menggarap lahan belum cukup baik serta terhadap petani yang baru membuka lahan untuk kegiatan pertanian. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari informasi tertulis (dokumen) yang sudah ada sebelumnya. Data yang menunjang terhadap tujuan penelitian dianalisis dan data yang sekiranya tidak diperlukan disisihkan.

Dari kegiatan penelitian ini disimpulkan bahwa *pertama*, kendala utama dalam pengelolaan lahan kawasan pesisir sebagai lahan pertanian adalah kesuburan tanah yang rendah, erosi oleh angin laut, sarana irigasi terbatas, jaringan jalan belum mencukupi, permodalan masyarakat petani rendah, cuaca yang berubah-ubah serta kadar garam dalam tanah relatif tinggi. *Kedua*, dalam memanfaatkan lahan kawasan pesisir, petani melakukan tindakan pencampuran pupuk kompos dan pupuk kandang serta bahan organik lainnya untuk meningkatkan kesuburan tanah dan melakukan penanaman tanaman penahan angin untuk menghambat laju erosi yang disebabkan oleh angin laut serta untuk menjaga kelestarian lingkungan. Untuk meningkatkan produktivitas lahan, petani melakukan pola tanam dengan metode tumpang sari

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
KATA PENGANTAR	iii
INTISARI	v
DAFTAR ISI	vi
Daftar tabel	x
Daftar gambar	xii
Daftar lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Pembatasan Masalah	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	13
A. Tinjauan Pustaka	13
1. Beberapa pengertian	13
a. Pantai	13
b. Pesisir	13
c. Pengelolaan wilayah pesisir terpadu	15
d. Lahan marjinal	19
e. Konservasi lahan pertanian pada kawasan pesisir.....	23

f. Optimalisasi lahan	26
g. Pengelolaan lahan berkelanjutan untuk usaha pertanian	27
2. Penggunaan dan pemanfaatan tanah.....	31
3. Kemampuan tanah.....	33
B. Kerangka Pemikiran	37
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Lokasi dan Objek Penelitian	42
1. Lokasi penelitian	42
2. Objek penelitian	42
C. Teknik Pemilihan Responden	43
D. Jenis dan Sumber Data	43
1. Jenis data	43
a. Data primer	44
b. Data sekunder	44
2. Sumber data	45
E. Metode Pengumpulan Data	46
F. Teknik Analisis Data	47
G. Tahapan Rencana Penelitian	50
H. Panduan Wawancara	51
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	52
A. Keadaan wilayah	52
1. Letak geografis dan batas wilayah	52

2. Luas wilayah	54
3. Penggunaan tanah	55
4. Kemiringan lahan	56
5. Jenis tanah	57
6. Status hak atas tanah pada kawasan pesisir pantai selatan Kabupaten Bantul	58
B. Kependudukan	59
1. Kepadatan penduduk	59
2. Kondisi sosial ekonomi	61
C. Aspek Pertanahan	64
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. Hasil Penelitian	66
1. Keberadaan lahan marjinal di kawasan pesisir Kabupaten Bantul	66
2. Proses penguasaan lahan kawasan pesisir oleh masyarakat	68
3. Peran instansi terkait dalam pengelolaan lahan Kawasan pesisir.....	72
4. Kendala pengelolaan lahan kawasan pesisir dan upaya petani dalam mengatasi kendala.....	77
a. Kendala pengelolaan lahan kawasan pesisir.....	77
b. Upaya petani dalam mengatasi kendala	81
5. Upaya pengelolaan lahan kawasan pesisir dari aspek ekonomi dan lingkungan	86

6. Tingkat keoptimalan pengelolaan lahan kawasan pesisir ..	90
7. Kelas kemampuan lahan kawasan pesisir	93
B. Pembahasan	96
1. Peran instansi pemerintah dalam pengembangan kawasan pesisir	96
2. Tingkat kemampuan lahan kawasan pesisir ditentukan oleh jenis kendala/faktor pembatas	98
3. Optimalisasi yang berkelanjutan dalam pengelolaan lahan kawasan pesisir	100
4. Ketersediaan lahan dan pemanfaatan lahan	103
5. Kesesuaian penggunaan lahan dengan RTRW Kabupaten Bantul	106
6. Pengelolaan lahan kawasan pesisir sebuah “Alternatif”....	110
BAB VI PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran	117
Daftar Pustaka	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.480 pulau, dengan sekitar 92 buah pulau kecil terluar. Sebagai konsekuensi yang muncul dari negara kepulauan terbesar, Indonesia juga memiliki garis pantai terpanjang, yaitu 81.000 km. Selain itu Indonesia juga berbatasan (daratan) dengan negara lain pada 15 kabupaten di 4 provinsi serta mempunyai kawasan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan tersendiri (Direktorat Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu BPN RI, 2009) .

Wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu yang mempunyai nilai strategis dan memiliki karakteristik khusus perlu dilakukan penataan, khususnya dibidang pertanahan yaitu penataan penggunaan, pemanfaatan, penguasaan dan pemilikan tanah. Penataan ini bertujuan agar sumber daya dan ekosistem yang ada tetap terjaga.

Wilayah pesisir Indonesia secara umum mempunyai bentuk lahan berlumpur (*muudy shores*), berbatu andesit dan berpasir (*sandy shores*) (Bloom, A.L., 1979 dalam Sri Hartono dkk, 2004 : 24).

Sebagai negara kepulauan, wilayah pesisir hampir dimiliki oleh seluruh propinsi yang ada di Indonesia. Namun sampai saat ini pengelolaan wilayah pesisir masih dirasa bersifat sektoral. Hal ini

dapat dilihat dari perbedaan tingkat kesejahteraan warga yang tinggal di daerah pesisir maupun dari faktor pembangunan infrastruktur antara bagian wilayah pesisir di daerah yang satu dengan daerah lainnya. Di samping itu pemerintah daerah pada tiap-tiap wilayah juga berbeda dalam memberikan perhatian dalam penanganan wilayah pesisir. Imbas dari perbedaan perhatian tersebut menghasilkan kebijakan dan instrumen kelembagaan yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya dalam mengelola wilayah pesisir.

Kondisi infrastruktur dan tingkat kesejahteraan penduduk di Provinsi Jawa Timur bagian pesisir selatan, Jawa Tengah bagian pesisir selatan, D.I. Yogyakarta, Jawa Barat bagian pesisir selatan, dan Banten nyaris sama. Wilayah pesisir utara Jawa sangat terbuka, berkembang, dan maju, secara sosial dan ekonomi. Wilayah ini terlihat pesat perkembangannya. Wilayah selatan justru sebaliknya, tidak ubahnya daerah yang nyaris tak tersentuh pembangunan Di Provinsi Jawa Timur, daerah-daerah seperti itu setidaknya melintasi delapan kabupaten yaitu Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, dan Banyuwangi (Redaksi Butaru, tt : 1).

Salah satu penyebab perbedaan tingkat kemajuan pesisir utara dan selatan Jawa adalah adanya perbedaan mencolok antara fisiografi pantai utara yang bertanah lempung dan berombak relatif tenang dengan pantai selatan yang bertanah pasir dan berombak sangat kuat (Ahmad Dwi Setyawan, 2008 : i). Oleh sebab itu, saat ini pemerintah

pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat sedang mengupayakan pengembangan wilayah pesisir selatan melalui berbagai program yang dilakukan oleh instansi-instansi yang terkait dengan masalah tersebut, salah satunya pengembangan budidaya pertanian dikawasan pesisir selatan Kabupaten Bantul Provinsi D.I Yogyakarta.

Tidak dapat dipungkiri memang kondisi fisik antara pesisir Jawa bagian utara dan bagian selatan berbeda sangat nyata. Kondisi fisik Jawa bagian utara relatif datar sehingga akses untuk membawa daerah tersebut berkembang lebih mudah, sedangkan wilayah pesisir Jawa bagian selatan umumnya bergelombang sehingga akses dan pembangunan infrastruktur sulit untuk menjangkaunya. Khususnya area yang berada pada lintas provinsi maupun dalam satu provinsi, sehingga kegiatan-kegiatan pengembangan kawasan pesisir berkesan sangat sektoral. Hal inilah yang menjadi kendala pemerintah dalam mengembangkan potensi pesisir Jawa bagian selatan. Sebagai contoh, perbatasan antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah maupun dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri antara wilayah Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Gunung Kidul. Kondisi topografi yang bergunung-gunung, berpasir, dan berbatu membuat proses pembangunan berjalan lambat

Seiring dengan perkembangan zaman dan bertambahnya populasi manusia yang tinggal di negara ini, sementara luasan daratan yang

tersedia jumlahnya tetap, berdampak pada timbulnya berbagai konflik kepentingan dalam usaha perolehan terhadap sebagian dari permukaan bumi atau yang disebut dengan tanah (Undang-Undang Pokok Agraria pasal 4 ayat 1) untuk mencukupi kebutuhan mereka, termasuk untuk tempat tinggal dan melaksanakan aktivitas lainnya. Hal ini sudah barang tentu akan berdampak pada terdesaknya lahan kosong khususnya lahan produktif yang digunakan sebagai lahan pertanian dan berubah fungsi menjadi area non pertanian sehingga tidak produktif lagi yang pada akhirnya berdampak pada penurunan jumlah produksi pangan.

Untuk mengantisipasi berkurangnya lahan-lahan produktif tersebut, diperlukan alternatif pemecahan masalah, diantaranya dengan memanfaatkan lahan yang berada pada kawasan pesisir sebagai lahan pertanian. Tentu saja untuk memanfaatkan lahan tersebut harus memerlukan perlakuan yang berbeda dari lahan-lahan pada umumnya, karena kondisi fisiknya yang marjinal maupun lokasi lahan tersebut yang kurang terjangkau. Lahan marjinal merupakan lahan yang memiliki keterbatasan dalam produktivitasnya maupun tingkat kemampuan lahan yang rendah untuk berbagai kegiatan di atasnya serta terbatas terhadap akses, baik akses jalan maupun sara irigasi. Pemanfaatan lahan pada kawasan pesisir yang memiliki faktor keterbatasan, supaya dapat berfungsi dengan baik sebagai lahan pertanian maupun kegiatan nonpertanian harus diolah sesuai dengan

kaidah-kaidah konservasi lingkungan agar kondisi fisik daripada lahan tersebut menjadi lebih produktif dan subur namun tidak menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan.

Demikian juga dengan akses menuju lokasi. Untuk menunjang kelancaran proses produksi maupun dalam pengelolaannya, jaringan jalan juga harus diperbaiki karena sebagian besar lokasi kawasan pesisir berada jauh dari komunitas manusia dengan tingkat ketersediaan jaringan jalan sangat kurang atau tidak terawat dengan baik.

Rokhim Danuri, Jacob Rais, Sapta Putra Ginting, dan M. J. Sitepu (2008 : 262-263) menjelaskan bahwa “masalah pemanfaatan pesisir tersebut muncul karena belum adanya keterpaduan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam serta berbagai kendala lainnya”, misalnya :

1. Pihak-pihak pemangku kepentingan menyusun rencana kerja sendiri-sendiri atau sektoral dan berbeda dengan kepentingan Pemda atau masyarakat setempat sebagai objek dari pengelolaan dan perencanaan
2. Belum ada pembagian kewenangan dan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir
3. Belum ada instansi tersendiri atau khusus yang menangani wilayah pesisir dan lautan

4. Belum tersedianya data dan informasi mengenai sumber daya kelautan
5. Lemahnya kemampuan aparatur dan kelembagaan dalam mengelola sumber daya kelautan secara lestari
6. Jumlah dan tingkat (laju) kegiatan pembangunan di kawasan pesisir dan laut belum ditetapkan atas dasar pertimbangan daya dukung lingkungan, dan kemungkinan timbulnya dampak negatif oleh suatu sektor (kegiatan pembangunan) terhadap sektor lainnya (*crosssectoral impacts*)
7. Pesatnya laju degradasi dan deplesi sumber daya laut
8. Belum ada batas pengelolaan yang tegas dan jelas tentang kawasan (wilayah) pesisir yang menjadi kewenangan provinsi dan juga antarbatas negara.

Secara umum penanganan masalah dan kendala tersebut, saat ini diperkenalkan teknik pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu (Rokhim Danuri, Jacob Rais, Sapta Putra Ginting, dan M. J. Sitepu, 2008 : 12), yaitu suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumber daya, dan kegiatan pemanfaatan (pembangunan) secara terpadu (*integrated*) guna mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Dalam konteks keterpaduan, meliputi tiga dimensi, yaitu : sektoral, bidang ilmu, dan keterkaitan ekologis.

'Kondisi pemanfaatan sumberdaya lahan dicirikan oleh kedinamikaan penggunaan dan penguasaan tanah yang tercermin pada struktur dan pola penggunaan tanah. Dalam pemanfaatan lahan berarti ada upaya yang dilakukan untuk menambah nilai dari lahan, baik upaya untuk menambah tingkat produktifitas dari lahan maupun fungsi dari lahan sendiri. Pemanfaatan tanah yang baik adalah pemanfaatan tanah yang tidak mengubah fungsi yang berjalan secara alami' (Soni Harsono, dalam Valentina Arminah, dkk, 2004 : 10).

Pengusahaan tanah pesisir untuk usaha pertanian masih sering terkendala oleh kondisi fisik dan lingkungan kawasan pesisir. Untuk wilayah pesisir yang kondisi fisiknya datar seperti pesisir pantai utara Jawa pada umumnya pengusahaan tanah sering terkendala oleh terjadinya genangan air baik air yang datang dari daerah daratan maupun air akibat rob/pasang air laut, sehingga wilayah pesisir pada umumnya berupa rawa dan air payau serta kondisi drainasenya tidak baik. Masalah lain yang sering terjadi pada kawasan pesisir utara Jawa, misalnya di Jawa Barat adalah terjadinya pendangkalan perairan yang disebabkan oleh abrasi karena penebangan tanaman bakau untuk usaha perluasan lahan dan perikanan (Laporan akhir BPLHD Prov. Jawa Barat dan PPPGL 2004 dalam Dyah Marganingrum, tt : 56)

Kondisi seperti ini berbeda dengan daerah pantai selatan Jawa yang wilayah pesisirnya didominasi oleh daerah berpasir dengan sifat tanah porus dan pegunungan gamping sebagai hasil peristiwa pengangkatan dasar laut misalnya di Kabupaten Gunung Kidul maupun kawasan pesisir selatan Provinsi Jawa Barat (Anonim 2004

dalam Dyah Marganingrum, tt : 57) dan topografinya berbukit serta sumber air jarang sehingga irigasi masih sangat kurang

Pantai berpasir yang terletak di pantai selatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya yang berada di Kabupaten Bantul keberadaannya cukup luas. 'Kurang lebih 3300 hektar dan baru dimanfaatkan oleh petani seluas kurang lebih 600 hektar untuk tanaman palawija dengan teknik irigasi menggunakan sumur renteng dan belum termanfaatkan secara optimal' (Sudiharjo, 2001 dalam Budi Setyono dan Suradal, 2009 : 2). BPS Bantul (2007, dalam Aris Slamet Widodo, 2008 : 2 dalam makalahnya tentang Dinamika Pembangunan Pertanian dan Perdesaan) disebutkan bahwa luas luas wilayah pesisir di Kabupaten Bantul luasnya 6.446 Ha tersebar di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Kretek, Kecamatan Sanden dan Kecamatan Srandakan. Pada beberapa tempat misalnya di Kecamatan Sanden, lahan berpasir yang ada di kecamatan tersebut sudah dilaksanakan budidaya tanaman pertanian seperti bawang merah menggunakan teknik *ameliorasi* dalam meningkatkan kesuburan lahannya. Kondisi iklim, terutama angin, bertiup cukup kencang dan mampu merobohkan tanaman semusim apabila tanpa pelindung (pagar). Air tanah dengan pH (derajat kemasaman) relatif netral berada pada kedalaman sekitar 6 meter. Kondisi air tanah yang netral ini hampir mendekati garis pantai dengan jarak sekitar 50-100 meter. Kondisi air tanah yang melimpah ini sangat berpotensi sebagai air minum maupun air irigasi

untuk budidaya pertanian. Hamparan pasir yang bergelombang juga digunakan untuk menjemur tanaman enceng gondok yang berasal dari Rawa Pening untuk digunakan sebagai bahan baku kerajinan

Pada dasarnya lahan pada kawasan pesisir selatan Kabupaten Bantul adalah lahan yang subur karena sebagian besar tanahnya berasal dari material Gunung Merapi. Namun karena tertutup oleh butiran pasir halus yang berasal dari pantai akibat erosi yang terjadi di kawasan pantai, maka lahan tersebut menjadi kehilangan kesuburannya pada lapisan atas. Dengan segala keterbatasan sumberdaya yang ada, saat ini petani lahan pasir di pesisir selatan Kabupaten Bantul sedang berupaya untuk mengembangkan berbagai budidaya pertanian untuk meningkatkan pendapatan mereka.

Peran pemerintah daerah sangat diperlukan disini, karena kondisi lahan yang marjinal dengan kondisi fisik tanah porus dengan kadar garam dalam tanah tinggi pada daerah yang relatif dekat dengan pantai serta saluran irigasi belum tersedia dengan baik, sangat tidak mungkin lahan-lahan tersebut dapat dikelola masyarakat sendiri secara tradisional maupun mandiri untuk meningkatkan produktivitas lahan sehingga mampu menopang kebutuhan hidup masyarakat.

Pengelolaan lahan kawasan pesisir yang sudah berjalan saat ini masih dirasa sangat parsial dan terfokus pada salah satu sektor saja yaitu pariwisata. Hal ini dibuktikan oleh kontribusi pemasukan dari sektor wisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten

Bantul sebesar 98,92% dari total PAD Kabupaten Bantul. 'Jenis wisata yang potensi untuk dikembangkan adalah wisata pantai dan wisata budaya' (Yulia Asyiwat dan Sinung Rustijarno, 2002 : 61). Sedangkan untuk pemanfaatan sektor lain belum dilakukan secara maksimal. Demikian juga dengan teknik pengelolaan lahan tersebut yang saat ini masih dilakukan secara tradisional oleh petani penggarap, diharapkan bimbingan dari pemerintah daerah melalui instansi terkait sehingga dalam pengelolaannya tetap memperhatikan kaidah-kaidah konservasi lingkungan sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga dan dapat memberikan manfaat secara optimal khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan petani pesisir.

Bertitik tolak dari uraian diatas, penyusun memandang perlu untuk melakukan penelitian dengan judul "OPTIMALISASI PENGELOLAAN LAHAN MARJINAL YANG BERKELANJUTAN PADA KAWASAN PESISIR DI KABUPATEN BANTUL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah di sampaikan pada bagian latar belakang masalah di atas, penyusun merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Kendala-kendala apa saja yang timbul dalam pengelolaan lahan marjinal pada kawasan pesisir

2. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam pengelolaan lahan marginal supaya dapat berfungsi optimal dan berkelanjutan ditinjau dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pengelolaan lahan marginal dan upaya penyelesaiannya
2. Untuk mengetahui berbagai teknik dalam mengelola lahan marginal agar dapat memberikan manfaat optimal dari sudut pandang ekonomi serta upaya yang dilakukan agar pengelolaan lahan tersebut tetap berkelanjutan sehingga tidak menimbulkan degradasi lingkungan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari kegiatan penelitian ini adalah :

1. Setelah diketahui berbagai masalah atau kendala pada pengelolaan lahan kawasan pesisir selatan Kabupaten Bantul, diharapkan hal tersebut dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam diskusi atau forum kegiatan pembelajaran mahasiswa.
2. Setelah diketahui berbagai teknik dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan marginal, dapat dilakukan kajian terhadap pengelolaan dan pemanfaatan lahan yang paling tepat sehingga dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam meningkatkan

kesejahteraan warga serta tetap memperhatikan keberlanjutan kelestarian lingkungan.

E. Pembatasan Masalah

Melihat cakupan yang sangat luas dalam upaya pengelolaan lahan pada kawasan pesisir, penyusun memberikan batasan pada jenis pengelolaan lahan untuk kegiatan pertanian dengan mengambil data melalui observasi langsung di lapangan, wawancara serta data sekunder yang diperoleh dari literatur maupun dari instansi terkait misalnya kantor pertanahan Kabupaten Bantul, , pemerintah daerah Kabupaten Bantul, serta instansi terkait lainnya yang ada dan berwenang membuat kebijakan terhadap pengelolaan lahan pesisir.

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang disampaikan pada BAB V tentang upaya masyarakat dalam mengoptimalkan lahan pada kawasan pesisir sebagai lahan pertanian, penyusun mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kendala utama dalam pemanfaatan lahan kawasan pesisir untuk kegiatan pertanian adalah kesuburan tanah yang rendah. Kendala lainnya adalah erosi oleh angin laut, saluran irigasi terbatas, jaringan jalan belum mencukupi, permodalan masyarakat petani rendah, cuaca yang berubah-ubah serta kadar garam dalam tanah relatif tinggi.
2. Upaya yang dilakukan petani dalam mengelola lahan marjinal agar berfungsi optimal dan berkelanjutan dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan adalah dengan mekanisme tumpang sari dan pemakaian pupuk organik dengan teknologi *ameliorasi*. Petani melakukan tindakan konservasi lingkungan dengan cara melakukan penanaman tanaman keras disekitar lahan yang digarap sekaligus sebagai tanaman penahan angin, disamping pemakaian pupuk ramah lingkungan. Pemanfaatan lahan pada kawasan pesisir dapat menjadi suatu alternatif mengatasi

keterbatasan lahan pertanian dan sebagai media lapangan kerja baru untuk peningkatan kesejahteraan petani

Selain beberapa hal diatas, penyusun mengambil beberapa nilai positif sebagai dampak dari pengelolaan lahan kawasan pesisir sebagai lahan pertanian. Beberapa hal yang ditemukan penyusun secara fisik terlihat adalah lahan kawasan pesisir yang semula tandus, kering, terpinggirkan sekarang kondisi ekosistemnya lebih baik. Banyak tanaman yang dapat tumbuh subur di kanan kiri jalan lokal yang menghubungkan antar lokasi wisata, lahan kosong mulai marak digarap oleh petani, cuaca di sekitar kawasan pesisir mulai sejuk karena tanaman konservasi penahan angin, kawasan pesisir yang dahulu sepi sekarang mulai marak dikunjungi orang sebagai sarana rekreasi maupun kepentingan ilmiah. Dari sisi sosiologi, dampak positif yang terjadi adalah kemauan dan kemampuan masyarakat untuk mengelola lahan sebagai lahan pertanian mulai tumbuh sehingga pengelolaan lahan pada kawasan pesisir sebagai lokasi pertanian dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan petani.

B. Saran

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul sebaiknya mencari solusi untuk penguatan hak terhadap lahan pada kawasan pesisir yang sudah digarap masyarakat termasuk pemetaan bidang tanah pada kawasan pesisir .

2. Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul sebaiknya dapat menggandeng beberapa instansi pemerintah daerah termasuk swasta dalam memberikan solusi dalam kaitannya terhadap akses dan aset reform untuk peningkatan pengelolaan lahan kawasan pesisir sebagai lahan pertanian dalam rangka penciptaan sumber kemakmuran masyarakat petani.
3. Pemerintah desa sebagai bagian dari pemerintah daerah yang terdekat dengan masyarakat sebaiknya lebih pro aktif dalam mendampingi masyarakat dalam menggarap lahan kawasan pesisir sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
4. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul diharapkan lebih intensif dalam memberikan penyuluhan dalam pengelolaan lahan kawasan pesisir dengan teknik bertani modern sehingga dapat meningkatkan produktivitas lahan kawasan pesisir sebagai bentuk antisipasi keterbatasan lahan pertanian yang semakin menyempit.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2010). Data Pokok Kabupaten Bantul dalam <http://bantulkab.go.id/>
- Anonim. (2010). Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam <http://www.bpn.go.id>
- Anonim (2008). “Menunggu Jalur Lintas Selatan Pulau Jawa Menjadi Kenyataan”. Buletin. Buletin Tata Ruang, Jakarta
- Arminah, Valentina, dkk.. (2004). Optimalisasi Pengelolaan Lahan Kawasan Pesisir di Kabupaten Kediri. STPN, Yogyakarta
- Asyiwat, Yulia dan Sinung Rustijarno. (2002). “Kontribusi Desa-desa Pesisir terhadap Pendapatan Wilayah Kabupaten Bantul”. Makalah (tidak dipublikasikan). UNISBA, Bandung
- Budiharsono, Sugeng .(2001). Teknik Analisis Pembangunan wilayah Pesisir dan Lautan. PT Pradnya Paramita, Jakarta
- Danuri, Rokhmin dkk.. (2008). Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. PT Pradnya Paramita, Jakarta
- Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul. (tanpa tahun). “Optimalisasi Lahan Pasir”. Makalah (tidak dipublikasikan), Yogyakarta
- Hadi, Sudharto P.. (2001). Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Harahap, Nora Elprida. (2009). Pengelolaan Wadi Kengser di Provinsi D.I. Yogyakarta. Skripsi, STPN, Yogyakarta
- Hardjowigeno, Sarwono dan Widiatmaka. (2007). Evaluasi Kesesuaian Lahan dan Perencanaan Tataguna Lahan. Gadjahmada University Press, Yogyakarta
- Harjadi, Beny. (2006). Model Rehabilitasi Lahan dan Konseervasi Tanah Pantai Berpasir. Laporan, Departemen Kehutanan

- Hartono, Sri dkk.. (2004). "Pengembangan Teknik Rehabilitasi Lahan Pantai Berpasir Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." Makalah (tidak dipublikasikan), Kebumen.
- Heide, Van Der. (1992). "Upaya Menuju Pertanian Berkelanjutan". Modul, dalam <http://www.worldagroforestry.org>
- Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. (2010). Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2009 (tidak dipublikasikan). Yogyakarta
- Kanwil BPN Provinsi D.I.Yogyakarta. (2008). Fakta dan Analisa Wilayah Pulau Jawa Bagian Selatan (tidak dipublikasikan), Yogyakarta
- Laksono. (2007). Kompilasi Kebijakan Management Wilayah Pantai dan Pulau-pulau Kecil. Konphalindo, Jakarta Selatan
- Marganingrum, Dyah. (tanpa tahun). "Tinjauan Karakteristik wilayah Pantai Utara dan Pantai Selatan Jawa Barat Dalam Rangka Pengelolaan Kawasan Pesisir Terpadu". Makalah. LIPPI, Jakarta
- Nugroho, Aristiono. (2007). "Panduan singkat Penggunaan Metode Kualitatif dalam Penelitian". Modul.STPN (tidak dipublikasikan), Yogyakarta
- Purwoko, Taufiq Tri. (2009). Persepsi Masyarakat Terhadap Nilai Sosiohistoris tanah *Sultan Grond* di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi, STPN, Yogyakarta
- Rahim, Supli Effendi. (2006). Pengendalian Erosi Tanah Dalam Rangka Pelestarian Lingkungan Hidup. Bumi Aksara, Jakarta
- Salikin, Karwan A.. (2003). Sistem Pertanian Berkelanjutan. Kanisius, Yogyakarta
- Sandy, I Made. (tanpa tahun). Tanah Muka Bumi. PT Indografi-FMIPA UI, Jakarta
- Satria, Arif .(2009). Pesisir dan Laut Untuk Rakyat. IPB Press, Bogor
- Setyawan, Ahmad Dwi. (2008). "Biodiversitas Ekosistem Mangrove di Jawa". Modul (tidak dipublikasikan).UNS, Surakarta

- Setyono, Budi dan Suradal. (2009). "Peningkatan Daya Saing Agribisnis Berorientasi Kesejahteraan Petani". Makalah, (tidak dipublikasikan). Departemen Pertanian, Bogor
- Sitorus, Santun R.P.. (1985), Evaluasi Sumber Daya Lahan. Tarsito, Bandung
- Suburi, Juni. (tanpa tahun). Konsep Wilayah Tanah Usaha Sebagai Dasar Penataan Suatu Wilayah. Buletin. Departemen Pertahanan, Jakarta Selatan
- Sugiyono. (2009), Metode Penelitian Administrasi.cv ALFABETA, Bandung
- Sukamto, tanpa tahun. Analisis Tata Guna Tanah. Modul. Yogyakarta
- Tarigan, Robinson. (2009). Perencanaan Pembangunan Wilayah. Bumi Aksara, Jakarta
- Utomo, Wani Hadi,. (1989). Konservasi Tanah di Indonesia. CV Rajawali, Jakarta Utara
- Widodo, Aris Slamet. (2007). "Kajian Usaha Tani Lahan Pantai di Kabupaten Bantul". Makalah, (tidak dipublikasikan). Yogyakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok agraria
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-Pulau Kecil
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional